

**PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, AFILIASI
ASING, DAN PROYEK PEMERINTAH
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011).**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

DINDA MAULIDA

NIM C2C009065

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama penyusun : Dinda Maulida

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009065

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN ASING,
AFILIASI ASING, DAN PROYEK
PEMERINTAH TERHADAP LUAS
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN**

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha., M.Si., Akt

Semarang, 28 Maret 2013

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt)

NIP. 19580525 199103 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Dinda Maulida

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009065

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN ASING,
AFILIASI ASING, DAN PROYEK
PEMERINTAH TERHADAP LUAS
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 11 April 2013

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt (.....)

2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D (.....)

3. Dul Muid, S.E, M.Si., Akt. . (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dinda Maulida, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, AFILIASI ASING, DAN PROYEK PEMERINTAH TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,

(Dinda Maulida)

NIM. C2C009065

MOTTO

Jadilah orang pintar yang bijaksana.

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.”

(Q.S Az-Zumaar : 53)

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya aku ingat (pula) kepadamu; dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”

(Q.S Al-Baqarah : 152)

“Straightforward”

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk :

Kedua orang tua, keluarga, dan pihak-pihak yang selalu bertanya “kapan lulus?”

ABSTRACT

This study investigates the influence of foreign affiliates and government on corporate social responsibility reporting (CSR disclosure). The foreign affiliates represented by foreign shareholders and foreign business affiliates. While government represented by government contract. The study used control variable profitability (ROA), industry sector, and size of firm.

The population in this study are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange and published annual report in the year 2011. Based on random sampling method, samples obtained is 50 companies in 2011. The criteria of CSR disclosure in this study was measured by using Corporate Social Responsibility index from Global Reporting Initiatives (GRI). This study used multiple regression as a data analysis tool.

The result of this research showed that government contract have significant impact on the CSR disclosure. Variable foreign shareholder and foreign business affiliates don't have significant impact on CSR disclosure.

Keyword : CSR disclosure, foreign affiliate, government, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh afiliasi asing dan pemerintah terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR disclosure*). Afiliasi asing di tunjukkan oleh kepemilikan saham oleh pihak asing dan afiliasi bisnis dengan pihak asing. Sedangkan pemerintah ditunjukkan dengan kontrak atau proyek dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol *profitabilitas* (ROA), sektor industri, dan ukuran perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2011. Berdasarkan metode *random sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 50 perusahaan pada periode 2011. Kriteria *CSR disclosure* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dari *Global Reporting Initiatives* (GRI). Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak atau proyek dari pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan variabel kepemilikan saham asing dan afiliasi asing tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kata kunci : *CSR disclosure, foreign affiliate, government, Indonesia*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Keterikatan Bisnis dengan Pihak Luar Negeri dan Pemerintah terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011)” dapat terselesaikan.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, adapun pihak-pihak tersebut antara lain, yaitu :

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Ibu Dr. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, Msi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas nasehat dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Herry Laksito, S.E, M.Adv Acc, Akt. selaku dosen wali atas bimbingan dan arahan yang diberikan.
5. Seluruh dosen dan segenap staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan.

6. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Achmad Triatmadja dan Ibu Maisatu Zuhroh yang selalu memberikan dukungan baik secara moriil maupun materiil, doa, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
7. Kakak Maulita Sari dan Adek Salsabila Almira Nugroho yang selalu memberikan motivasi, doa, dan kasih sayangnya.
8. Sahabat Bianglala tersayang, Pramesitningrum, Enjelina Intan P D, Fidelis Argiwidya M, Dyah Ayu R K, Choirun Nisaa' R, Oktita Earning H, dan Wulan Budi A atas keluarga kecilnya, kebersamaan, dan kerja samanya.
9. Sahabatku Koko Duppy, Eryke Pramesta, Rini Dwijayanti, Kharisma Annindya P H, Garnis Tidaryanti, Yulia Indriatuti, Rio Oino atas keceriaan, semangat dan kebersamaan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan akuntansi 2009 atas motivasi, kerjasama, keceriaan, bantuan, support serta kebersamaannya selama ini.
11. Teman-teman KKN Mayangan Endah, Nurma, Sus, Luthfan, Syahdam, Ihot, Irwan, Rifki dan Galih atas semangat dan kebersamaannya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 28 Maret 2013

Dinda Maulida

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Kelembagaan	10
2.1.2 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	13
2.1.3 Pengungkapan CSR di Indonesia	14
2.1.4 Kepemilikan Asing.....	18
2.1.5 Afiliasi Asing	18
2.1.6 Proyek Pemerintah	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	24
2.4 Pengembangan Hipotesis	24
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR	25
2.4.2 Pengaruh Afiliasi Asing terhadap Pengungkapan CSR	26
2.4.3 Pengaruh Proyek Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Variabel Penelitian dan definisi Operasional Variabel	29
3.1.1 Variabel Dependen	29
3.1.2 Variabel Independen	30
3.1.3 Variabel Kontrol.....	31
3.2 Populasi dan Sampel	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	34
3.5 Metode Analisis Data	35
3.5.1 Statistik Deskriptif	35
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	35

3.5.3 Analisis Regresi	38
3.5.4 Pengujian Hipotesis	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	42
4.2 Analisis Data	43
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	43
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	45
4.2.2.1 Uji Normalitas	45
4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas	46
4.2.2.3 Uji Multikolinearitas	48
4.2.3 Uji Hipotesis	49
4.2.3.1 Uji F	50
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi	51
4.2.3.3 Uji t	51
4.3 Pembahasan	53
4.3.1 Hipotesis 1	53
4.3.2 Hipotesis 2	54
4.3.3 Hipotesis 3	54
4.3.4 Variabel Kontrol	55
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Keterbatasan dan Saran	57
5.2.1 Keterbatasan	57
5.2.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Deskripsi Objek Penelitian	42
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.3 Hasil Uji Frekuensi	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Park	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1 Normal Probability Plot	45
Gambar 4.2 Scatterplot	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Nama Perusahaan Sampel	61
Lampiran B Daftar Pengungkapan CSR Menurut GRI	63
Lampiran C Tabulasi Data	69
Lampiran D Output SPSS	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Topik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) sampai tahun 2012 masih merupakan topik yang hangat diperbincangkan. *Corporate social responsibility* merupakan klaim agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga untuk kemaslahatan pihak *stakeholders* dalam praktik bisnis yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, konsumen dan lingkungan (Dahlia dan Siregar, 2008). Dengan demikian adanya CSR mengubah pandangan perusahaan menjadi tidak hanya berorientasi pada profit yang akan dicapai, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitar.

Selain itu, masyarakat modern memiliki pemikiran yang lebih kritis dalam kontrol sosial dalam dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan CSR mulai terbangun. Adanya kerusakan lingkungan karena polusi yang ditimbulkan oleh industri, semakin maraknya penggundulan hutan, serta adanya isu mengenai perubahan iklim menjadikan perkembangan CSR di Indonesia semakin luas.

Di Indonesia setidaknya terdapat dua Undang-Undang yang mengamanatkan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial. Pertama, Pasal 15b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang

menyatakan, bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga dicantumkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka CSR merupakan tindakan wajib bagi setiap perusahaan di Indonesia.

Dalam *Global Compact Initiative* (2002) disebutkan bahwa pemahaman CSR dengan 3P yaitu *profit, people, planet*. Konsep ini memuat pengertian bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (*profit*) melainkan juga kesejahteraan orang (*people*) dan menjamin keberlangsungan hidup planet (Nugroho, 2007 dalam Dahlia dan Siregar, 2008). Dengan begitu, eksistensi suatu

perusahaan tidak hanya dilihat dari berapa keuntungan yang telah dicapai, tetapi juga dari bagaimana perusahaan tersebut ikut andil dalam melestarikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek dari CSR yang menjadi sorotan adalah mengenai pengungkapannya. Pengungkapan CSR digunakan oleh investor dan rekan kerja untuk menilai sejauh mana perusahaan peduli terhadap lingkungan. Investor atau rekan kerja yang paling berpengaruh dalam keberlangsungan perusahaan antara lain adalah pemerintah dan pihak asing (luar negeri). Pihak asing dianggap paling memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Negara-negara asing misalnya di Eropa dan Amerika merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan lingkungan yang mencakup isu-isu sosial; seperti pelanggaran hak asasi manusia, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman, 2008).

Selain sebagai investor, pemerintah dan pihak asing juga dapat berperan sebagai rekan kerja. Dengan adanya pengungkapan CSR yang baik, maka pihak-pihak di luar perusahaan mau berkerjasama. Sebagai contoh, pemerintah akan memberikan proyek untuk perusahaan yang mempunyai pengungkapan CSR yang baik, karena dinilai perusahaan tersebut peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Pihak luar negeri pun juga akan mau melakukan afiliasi terhadap perusahaan yang mempunyai tingkat pengungkapan CSR yang baik karena sesuai penjelasan diatas bahwa pihak luar negeri dianggap paling memperhatikan lingkungan.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pihak asing dan pemerintah terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini juga dimotivasi, masih terdapat kebijakan ekonomi-politik pemerintah Indonesia dan produk hukum yang kurang kondusif dalam mendorong investasi yang ramah sosial dan lingkungan (www.csrindonesia.com). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kuantitas praktek CSR di Indonesia masih rendah. Selain itu, hasil dari penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraini (2006) menganalisis faktor-faktor penentu yang digunakan perusahaan sebagai pertimbangan untuk pengungkapan CSR. Faktor-faktor yang digunakan adalah kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industri dan *profitabilitas*. Penelitian lain dilakukan oleh Puspitasari (2009) yang menemukan bahwa faktor kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Djakman dan Machmud (2008) dengan menyelidiki pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, serta kategori perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non BUMN tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian lain dilakukan oleh Darus dan Othman (2009) tentang pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan di Malaysia. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Djakman dan Machmud (2008) serta Amran dan Devi (2008) yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darus *et al.* (2009) dan Puspitasari (2009) menunjukkan ada pengaruh signifikan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Amran dan Devi (2008) tentang pengaruh pemerintah dan afiliasi dengan pihak asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di Malaysia, sedangkan kepemilikan asing dan afiliasi asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR di Malaysia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Darus dan Othman. (2009) dan Amran dan Devi (2008) adalah lokasi penelitian. Pada penelitian Darus *et al.* (2009) dan Amran dan Devi (2008) membahas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdapat di Malaysia, sedangkan penelitian ini membahas pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian oleh Djakman dan Machmud (2008) membahas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006. Sedangkan penelitian ini membahas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011. Selain itu, pada penelitian ini hanya

digunakan variabel independen kepemilikan saham asing, afiliasi asing, dan proyek pemerintah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh campur tangan pihak asing dan pemerintah serta adanya anggapan bahwa CSR adalah salah satu kegiatan perusahaan untuk menambah citra suatu perusahaan untuk menarik perhatian investor dan rekan kerja khususnya pihak asing dan pemerintah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah "Apakah campur tangan pihak asing dan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)?"'. Sesuai dengan permasalahan tersebut, dapat dijabarkan beberapa pertanyaan untuk penelitian, sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh positif kepemilikan saham asing terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah ada pengaruh positif afiliasi asing terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah ada pengaruh positif keberadaan proyek pemerintah terhadap pengungkapan CSR?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisa apakah ada pengaruh positif antara campur tangan pihak luar perusahaan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Secara khusus penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan saham asing, afiliasi asing, dan proyek pemerintah terhadap pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, maka penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini akan membuka pemikiran perusahaan tentang pentingnya melakukan pengungkapan sosial.
3. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini, maka dapat membantu pemerintah dalam memonitor pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan di Indonesia sehingga pemerintah dapat menentukan standar yang cocok untuk mengatur pengungkapan sosial perusahaan.
4. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai sarana memperluas wawasan mengenai pengungkapan sosial pada perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing – masing bab secara singkat dan jelas keseluruhan skripsi. Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang akan diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis serta hipotesis yang terjadi pada permasalahan yang diangkat.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian selanjutnya akan lebih baik.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini berdasar pada teori kelembagaan yang menyatakan bahwa terbentuknya organisasi dikarenakan tekanan lingkungan *institusional* yang menyebabkan terjadinya *institusionalisasi*. Dalam penelitian ini lingkungan *institusional* yang dimaksud adalah pemerintah dan pihak asing yang ikut berpengaruh dalam kegiatan suatu perusahaan. Adanya pihak luar perusahaan yang mempengaruhi kinerja suatu usaha mengakibatkan ada perbedaan dalam pengungkapan CSR di perusahaan tersebut.

2.1.1 Teori Institutional

Teori Institutional berfokus pada aspek yang lebih dalam dan lebih tangguh dari struktur sosial yang mempertimbangkan proses yang struktur, termasuk skema, aturan, norma, dan rutinitas yang menjadi pedoman otoritatif untuk perilaku sosial (Scott, 2004). Dalam teori ini dijelaskan bahwa adanya tekanan dari pihak luar perusahaan akan mempengaruhi struktur dalam perusahaan tersebut.

Meyer dan Scott (1983) dalam Donaldson (1995), mengklaim bahwa organisasi berada dibawah tekanan berbagai kekuatan sosial guna melengkapi dan menyelaraskan sebuah struktur, organisasi harus melakukan kompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah, karena struktur organisasi tidak ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi

masyarakat secara umum dimana bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat.

Kekhususan teori institusional terletak pada paradigma norma-norma dan legitimasi, cara berpikir dan semua fenomena sosiokultural yang konsisten dengan instrumen teknis pada organisasi. DiMaggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), melihat ada tiga bentukan *institusional* yang bersifat *isomorphis* yaitu,

1. *Coersif isomorphis* yang menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas.
2. *Mimesis isomorphis*, yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain.
3. *Normatif isomorphis*, karena adanya tuntutan profesional.

Di Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), kemudian mengidentifikasi beberapa penyesuaian organisasi pada teori institusional antara lain:

1. Penyesuaian Kategorial

Penyesuaian kategorial terjadi ketika aturan-aturan institusional mengarahkan organisasi membentuk struktur yang kemudian akan menghasilkan struktur homogen. Konvensi-konvensi tersebut kemudian menjadi semacam 'kamus struktur' (Meyer dan Rowan, 1977). Organisasi digabungkan dalam sebuah sistem keyakinan

kognitif seperti ini karena akan memperbesar legitimasi mereka dan akan menambah sumber dan kapasitas ketahanan mereka.

2. Penyesuaian Struktural

Penyesuaian struktural disebabkan oleh peraturan pemerintah, ketidakpastian lingkungan, atau mencari legitimasi. Perusahaan akan mengadopsi struktur organisasi yang spesifik (biasanya dengan menyewa seseorang dari perusahaan yang sukses atau menyewa konsultan). Pemerintah biasanya memberlakukan peraturan baru pada organisasi seperti program keselamatan kerja atau kelompok gerakan *afirmatif*. Kelompok profesional biasanya membentuk sejumlah program-program akreditasi.

3. Penyesuaian Prosedural

Disamping struktur, organisasi biasanya terpengaruh untuk melakukan sesuatu dalam beberapa cara pula. Kadangkala penyesuaian atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian atau paksaan (*coersive*), dan pemaknaan normatif.

4. Penyesuaian Personil

Organisasi modern memiliki berbagai aturan spesialisasi disertai dengan sertifikat profesional (khususnya pada organisasi di Barat). Penyesuaian terhadap aturan-aturan institusi biasanya perlu untuk menyewa atau menggunakan personil yang spesifik.

Penyesuaian organisasi tersebut menjelaskan ada berbagai macam tekanan antara lain dalam hal kekuasaan, kewajiban legal, ancaman gugatan, perolehan

legitimasi, sumber dana, subordinasi pada organisasi induk, kebutuhan untuk menyesuaikan pada sebuah sistem teknis (telekomunikasi dan interkoneksi), penyesuaian dengan aturan-aturan yang dilembagakan.

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan klaim agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga untuk kemaslahatan pihak stakeholders dalam praktik bisnis yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, konsumen dan lingkungan (Dahlia dan Siregar, 2008). OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mendefinisikan CSR sebagai :

“Business’s contribution to sustainable development and that corporate behavior must not only ensure returns to shareholders, wages to employees, and products and services to consumers, but they must respond to societal and environmental concerns and value”

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan (Kotler & Nancy, 2005). Perusahaan yang menjalankan model bisnisnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip etika bisnis dan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang strategik dan sustainable akan dapat menumbuhkan citra positif serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Wibisono, 2007).

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebagai:

“Continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.

Maksud dari pengertian tersebut adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Menurut *Global Compact Initiative* (2002), pemahaman CSR mencakup 3P yaitu *profit, people, planet*. Konsep ini memuat pengertian bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (*profit*) melainkan juga kesejahteraan orang (*people*) dan menjamin keberlangsungan hidup planet (Nugroho, 2007 dalam Dahlia dan Siregar,2008). Dengan begitu, perusahaan yang menggunakan praktik CSR dengan benar, pasti akan peduli dengan lingkungan sekitar. Dengan cara itu pula suatu perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat luas sehingga diakui keberadaannya.

2.1.3 Pengungkapan CSR di Indonesia

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 2007). Pengungkapan tanggung jawab sosial atau Corporate social reporting (CSR) menurut Gray *et al.* (1987) adalah

The process of communicating the social and environmental effects of organizations' economic actions to particular interest groups within society and to society at.

Maksud dari pengertian tersebut adalah pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi organisasi untuk kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat.

Perusahaan dalam operasi usahanya pasti membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Dampak negatif seperti polusi udara, pencemaran limbah, penggundulan hutan, dan sebagainya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka perusahaan melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban sosial. Dengan adanya kegiatan tanggung jawab sosial ini maka perusahaan ikut peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan hidup di sekitar. Agar masyarakat dapat mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, maka perlu adanya pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan ini tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

Di Indonesia regulasi mengenai CSR telah di atur oleh pemerintah sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen), untuk menjalankan CSR.

Pasal 15b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga tercantumkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka CSR merupakan tindakan wajib bagi setiap perusahaan di Indonesia.

Selain peraturan di atas masih ada peraturan mengenai CSR, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup,

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan,
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 Tentang praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat,
5. dan lain-lain.

Dengan penambahan peraturan-peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan CSR merupakan kewajiban setiap badan usaha yang ada di Indonesia.

Salah satu standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah standar yang dikembangkan oleh GRI. GRI (*Global Reporting Initiative*) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Tiga fokus pengungkapan GRI, antara lain:

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*), 9 item,
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*), 30 item,
3. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*), 40 item, terdiri dari :
 - a. Tenaga kerja (*Labor and decent work*)
 - b. Hak Asasi Manusia (*Human Rights Performance*)
 - c. Sosial (*Society*)

- d. Tanggung jawab produk (*Product responsibility performance*).

2.1.4 Kepemilikan Asing

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap peduli terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui negara-negara di Amerika dan Eropa sangat memperhatikan isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman, 2008). Salah satu bukti bahwa negara Eropa peduli terhadap sosial adalah di bentuknya *European Environmental Agency* (EEA) yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan bertepatan lingkungan hidup di Eropa.

2.1.5 Afiliasi Asing

Selain kepemilikan saham, pihak asing juga ikut serta dalam kegiatan perusahaan dengan kerja sama atau afiliasi. Afiliasi adalah bentuk kerjasama antara dua lembaga yang masing-masing berdiri sendiri. Lembaga dalam kasus ini adalah perusahaan di Indonesia dengan perusahaan atau organisasi di luar negeri.

Seperti yang telah dijelaskan pada kepemilikan asing, pihak asing adalah pihak yang peduli terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perusahaan dengan reputasi baik di bidang sosial memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam berafiliasi dengan pihak asing.

2.1.6 Proyek Pemerintah

Definisi Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagian; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas; untuk menggunakan kekuasaan; penguasa suatu Negara atau bagian Negara; dan badan tertinggi dari yang memerintah suatu Negara seperti Kabinet dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden.

Dalam campur tangan terhadap perusahaan, pihak pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan perusahaan melalui proyek atau tender. Tidak hanya untuk perusahaan negeri saja, proyek atau tender yang diberikan oleh pemerintah juga berlaku bagi perusahaan swasta. Sebagai contoh, kontraktor dalam pembangunan fasilitas negara atau fasilitas umum. Kontraktor merupakan pihak swasta yang dipilih pemerintah untuk melakukan proyek pemerintah.

Penelitian ini menggunakan variabel keberadaan proyek dari pemerintah. Pemerintah yang termasuk dalam variabel adalah pemerintah Indonesia, DPR, MPR, Presiden, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta pemerintah

kabupaten. Badan usaha yang dimiliki pemerintah/negara atau BUMN tidak termasuk dalam definisi pemerintah dalam penelitian ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan pada peneliian-penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian terdahulu masih belum konsisten. Berikut penjabaran dari penelitian terdahulu.

Anggraini (2006) mengamati tingkat pengungkapan CSR dan faktor-faktor penentu yang digunakan perusahaan sebagai pertimbangan untuk pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan kategori kinerja lingkungan, kinerja ekonomi, dan kinerja sosial yang diungkapkan oleh Darwin (2004). Populasi penelitian ini adalah semua sektor perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2000-2004. Faktor-faktor yang diteliti adalah kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industri dan *profitabilitas*. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajemen dan tipe industri menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk pengungkapan CSR.

Amran dan Devi (2008) meneliti pengaruh pemerintah dan afiliasi asing dengan perkembangan CSR. Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2002/2003. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan CSR di Malaysia, sedangkan afiliasi dengan pihak asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Machmud dan Djakman (2008) menyelidiki pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan institutional sebagai pertimbangan perusahaan dalam

pengungkapan CSR pada laporan tahunan 2006. Hasil penelitian adalah kepemilikan asing dan institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Darus dan Othman (2009) meneliti tentang pengaruh dari tekanan lembaga dan struktur kepemilikan pada pengungkapan CSR. Variabel independen dalam penelitian ini adalah antisipasi dari pemerintah, keberadaan peraturan pemerintah, dewan *interlock*, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan variabel lain berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Puspitasari (2009) menganalisis faktor perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006 dan 2007. Hasil dari penelitian ini adalah faktor kepemilikan asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri, dan tipe industri berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR, sedangkan *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan.

Untuk lebih singkatnya, maka berikut ini adalah tabel tentang ringkasan penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

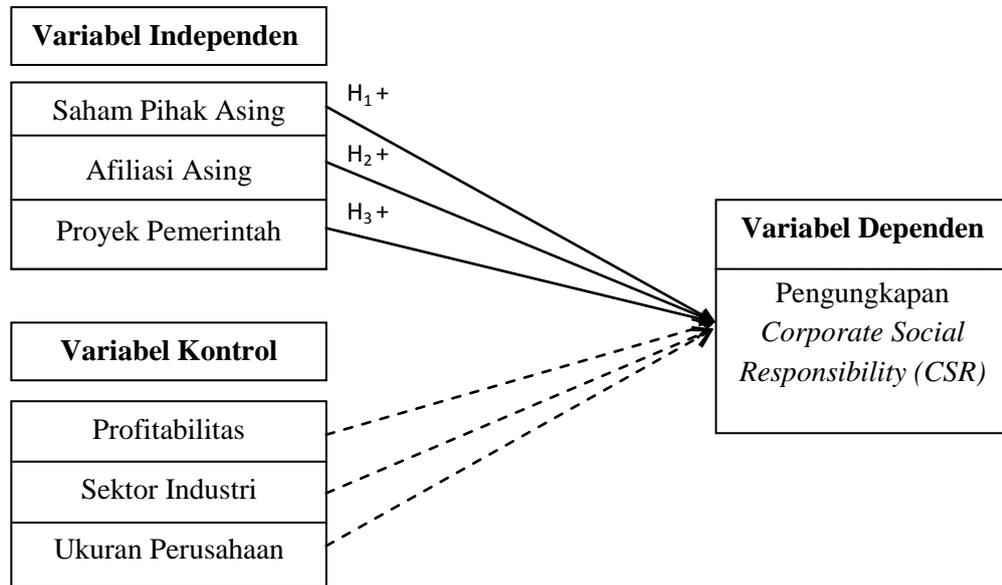
No	Peneliti (Tahun)	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Anggraini (2006)	Regresi berganda	Independen : kepemilikan manajemen, <i>lverage</i> , ukuran perusahaan, tipe industri dan <i>profitabilitas</i> Dependen: <i>CSR disclosure</i>	Kepemilikan manajemen dan tipe industri menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk pengungkapan CSR.
2.	Amran dan Devi (2008)	Regresi berganda	Independen : <i>government share</i> , <i>foreign share</i> , <i>dependence on goverbment</i> , <i>foreign afiliation</i> , <i>industry</i> , <i>size</i> , <i>profitability</i> Dependen : <i>CSR disclosure</i>	Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan CSR di Malaysia, sedangkan afiliasi dengan pihak asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
3.	Machmud dan Djakman (2008)	Regresi berganda	Independen : kepemilikan asing, kepemilikan institutional Dependen : <i>CSR disclosure</i>	Kepemilikan asing dan institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
4.	Darus dan Othman (2009)	Regresi berganda	Independen : antisipasi dari pemerintah, keberadaan peraturan pemerintah, dewan interlock, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing Dependen : <i>CSR disclosure</i>	Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan varibel lain berpengaruh secara signifkana terhadap pengungkapan CSR

5.	Puspitasari (2009)	Regresi berganda	Independen : kepemilikan asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri, tipe industri, <i>profitabilitas</i> Dependen : <i>CSR disclosure</i>	Faktor kepemilikan asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri, dan tipe industri berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan.
----	--------------------	------------------	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk membantu memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka diperlukan suatu kerangka pemikiran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, penulis mengindikasikan variabel independen yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah kepemilikan saham asing, kerjasama dengan pihak asing (afiliasi asing), dan kerjasama dengan pemerintah (proyek pemerintah).

Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka di atas dapat dirumuskan bahwa semua variabel independen yaitu kepemilikan saham pihak asing, afiliasi asing, dan proyek pemerintah berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan CSR. Selain variabel independen, dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*size*), jenis/sektor industri, dan profitabilitas.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di bagian sebelumnya yaitu tentang teori kelembagaan dan teori mengenai CSR pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian. Pembahasan mengenai hipotesis adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR

Machmud dan Djakman (2008) pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Pihak asing akan lebih tertarik pada perusahaan dengan reputasi baik di bidang sosial karena negara-negara asing misalnya di Eropa dan Amerika merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan lingkungan yang mencakup isu-isu sosial; seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman, 2008). Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak luar negeri akan lebih didukung dalam pengungkapan tanggung jawab sosial.

Adanya penyesuaian prosedural pada penyesuaian organisasi yang terdapat pada teori kelembagaan menyatakan bahwa kadangkala penyesuaian atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian atau paksaan (*coersive*), dan pemaksaan normatif. Jadi secara tidak langsung, suatu perusahaan akan mengadopsi struktur yang digunakan oleh pihak asing. Menurut Susanto (1992) dalam Puspitasari (2009), perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak, dikarenakan beberapa alasan antara lain :

1. Perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR,

2. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih dalam dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri,
3. Perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk,
4. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif perusahaan dengan kepemilikan saham oleh pihak asing terhadap luas pengungkapan CSR.

2.4.2 Pengaruh Afiliasi Asing terhadap Pengungkapan CSR

Perusahaan dengan rekanan kerja dari pihak luar negeri akan lebih luas dalam pengungkapan CSR (Amran dan Devi, 2008). Dengan adanya reputasi yang baik di bidang sosial, maka diharapkan bahwa pihak luar negeri akan terus melakukan kerja sama dengan perusahaan. Pihak luar negeri merupakan pemerhati sosial yang tinggi, sebagai contoh Amerika dan Jepang. Padahal Amerika dan Jepang merupakan negara yang maju dalam perkembangan bisnis. Adanya penyesuaian prosedural pada penyesuaian organisasi yang terdapat pada teori kelembagaan menyatakan bahwa kadangkala penyesuaian atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian atau paksaan (*coersive*), dan pemaksaan normatif. Jadi secara tidak langsung, suatu perusahaan akan mengadopsi struktur yang digunakan oleh pihak asing. Oleh karena itu perusahaan mengalami semacam tekanan untuk serius memulai dan melaksanakan CSR agar pihak luar negeri

bersedia melakukan kerjasama dengan perusahaan. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh positif afiliasi asing terhadap luas pengungkapan CSR

2.4.3 Pengaruh Pemberian Proyek dari Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR

Kelangsungan hidup suatu perusahaan akan terus berjalan selama perusahaan memperoleh proyek atau tugas. Perusahaan dengan proyek pemerintah yang mendominasi akan terus berusaha agar pemerintah tidak menarik proyek dan berpindah ke perusahaan lain yang dinilai lebih baik. Pemerintah merupakan pembeli utama atau klien perusahaan, jadi perusahaan akan melaksanakan CSR dan menyajikan pengungkapan tanggung jawab sosial mereka agar pemerintah tertarik dan memberikan proyek tersebut (Amran dan Devi, 2008).

Sesuai dengan teori kelembagaan yang telah dijelaskan, tentang penyesuaian struktural ada penyesuaian organisasi. Penyesuaian struktural disebabkan oleh peraturan pemerintah, ketidakpastian lingkungan, atau mencari legitimasi. Perusahaan akan mengadopsi struktur organisasi. Pemerintah biasanya memberlakukan peraturan baru pada organisasi seperti program keselamatan kerja atau kelompok gerakan *afirmatif*. Kelompok profesional biasanya membentuk sejumlah program-program akreditasi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya campur tangan pemerintah, dalam hal ini proyek yang diberikan dari pemerintah terhadap perusahaan berpengaruh terhadap struktur perusahaan, dalam hal ini pengungkapan CSR. Sebagai bukti nyatanya adalah adanya peraturan pemerintah tentang CSR.

Dengan adanya keinginan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan maka perusahaan dengan proyek dari pemerintah akan selalu memperbaiki pengungkapan tanggung jawab sosial mereka (Amran dan Devi, 2008). Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh positif perusahaan yang mendapatkan proyek pemerintah terhadap luas pengungkapan CSR.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah *corporate social responsibility reporting* atau pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari kepemilikan saham asing, afiliasi asing, dan kerjasama dengan pemerintah serta variabel kontrol ukuran (*size*), laba tahun sebelumnya, dan jenis industri.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada Laporan Tahunan perusahaan yang dinyatakan dalam *Corporate Social Disclosure Index (CSDI)* dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan pengungkapan yang disyaratkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI terdiri dari enam pengungkapan, yaitu *economics, environment, labour practices, human rights, society*, dan *product responsibility* yang meliputi 79 item pengungkapan. Mengingat masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam bentuk *sustainability reporting*, maka

penelitian ini pun terbatas hanya pada data-data yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

Pengukuran indeks pengungkapan CSR dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode pengkodifikasian teks dengan ciri-ciri yang sama ditulis dalam berbagai kelompok atau kategori berdasar pada kinerja yang ditentukan (Weber, 1988 dalam Sembiring, 2005). Pengukuran ini hanya dilakukan satu kali untuk setiap item tanpa mempertimbangkan adanya pengungkapan item tersebut dalam halaman atau bagian lain dengan bahasa yang berbeda. Apabila item informasi yang ditentukan diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 1, dan jika item informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 0. Perhitungan CSDI dirumuskan sebagai berikut :

$$CSDI = \frac{\sum X}{n}$$

Dimana :

CSDI : *Corporate Social Disclosure Index* perusahaan

n : Jumlah item pengungkapan CSR oleh GRI, n = 79

$\sum X$: Jumlah item yang diungkapkan perusahaan, X bernilai 1 jika item diungkapkan dan bernilai 0 jika item tidak diungkapkan

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Kepemilikan Saham Asing

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik individu atau lembaga terhadap saham perusahaan di

Indonesia. Variabel ini dapat dihitung dengan rasio kepemilikan saham oleh perusahaan yang berkedudukan di luar negeri untuk jumlah saham yang diterbitkan sesuai dengan yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

$$\text{Kepemilikan saham asing} = \frac{\text{Kepemilikan saham asing}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

3.1.2.2 Afiliasi Asing

Perusahaan dengan afiliasi asing adalah perusahaan yang mempunyai mitra dari pihak asing atau luar negeri/ keterkaitan bisnis dengan pihak luar negeri. Pengukuran variabel ini dapat dilakukan dengan pengkodean, yaitu 1 untuk perusahaan yang mempunyai mitra asing (luar negeri), dan 0 untuk perusahaan yang tidak mempunyai mitra asing (luar negeri). Pengkodean ini sesuai dengan yang tercantum pada profil perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.3 Proyek Pemerintah

Perusahaan yang mempunyai proyek pemerintah dapat diketahui dari ada atau tidaknya proyek dari pemerintah untuk perusahaan tersebut. Variabel ini dapat dihitung dengan pengkodean, yaitu 1 untuk perusahaan yang menerima proyek pemerintah, dan 0 untuk perusahaan yang tidak menerima proyek pemerintah. Pengkodean ini sesuai dengan yang tercantum pada profil perusahaan dalam laporan tahunan.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang mengontrol hubungan variabel dependen dan variabel independen dan pasti berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.1.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran keberhasilan manajemen sebagaimana ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi. Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas menggunakan ROA tahun sebelumnya yang tercatat dalam laporan tahunan. Return on asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan. *Profitabilitas* berdasar ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Earning before Tax (EBT)}}{\text{Total Aset}}$$

3.1.3.2 Sektor Industri

Jenis industri merupakan sektor industri yang dimana perusahaan melakukan kegiatan usahanya. Dalam penelitian ini sektor industri dibedakan menjadi perusahaan yang bergerak pada bidang industri dan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa. Untuk perusahaan manufaktur, konsumsi, dan industri kimia dasar akan digolongkan dalam perusahaan industri. Sedangkan perusahaan perkebunan dan pertambangan, pertanian, perdagangan dan teknologi, serta properti dan realestate digolongkan dalam perusahaan non-industri. Pengukuran variabel ini dengan memberi kode 1 untuk perusahaan industri dan 0 untuk perusahaan non industri. Jenis perusahaan ini dapat diketahui melalui profil perusahaan yang terdapat pada laporan tahunan.

3.1.3.3 Ukuran Perusahaan (size)

Ukuran perusahaan adalah diukur berdasarkan nilai buku total aset yang dimiliki. Total aset tersebut diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan yang dinilai dengan total aset akan diubah dalam bentuk logaritma

dengan tujuan menyetarakan dengan nilai variabel lain, karena jumlah total aset akan lebih besar dari jumlah variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \log (\text{nilai buku total aset})$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel menggunakan metode *random sampling* dengan kriteria. Metode tersebut dipilih karena sampel bersifat sama (homogen) dengan kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) periode 2011 secara lengkap. Periode tahun 2011 dipilih sebab di Indonesia pada tahun 2011 terjadi 2.400 bencana alam, sedangkan pada tahun 2010 hanya terjadi 2.232 bencana alam. Artinya pada tahun 2011 mengalami peningkatan bencana alam. Salah satu sebab bencana alam adalah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan daripada tahun 2010.

2. Mempunyai data yang lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham asing, karena proporsi kepemilikan saham asing adalah variabel independen dalam penelitian ini.
3. Perusahaan yang menjadi sampel bukanlah perusahaan sektor finansial, sebab tidak ada aturan yang mewajibkan perusahaan sektor finansial untuk melakukan CSR. CSR dilakukan oleh perusahaan yang memberikan dampak bagi lingkungan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011. Data di peroleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu metode dengan teknik pengambilan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan yang kemudian ditelusuri dan dicatat seluruh informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Laporan tahunan yang dipublikasikan untuk penelitian ini adalah

laporan pada tahun 2011. Sebagai panduan, digunakan suatu daftar pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan CSR sesuai dengan indeks GRI.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, akan diolah sehingga akan memberikan informasi yang bermanfaat. Pengolahan dan penganalisisan data tersebut dengan menggunakan alat statistik sebagai berikut :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009). Standar deviasi yang semakin besar menggambarkan variabel tersebut semakin menyebar. Skewness dan kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari variabel dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi variabel. Variabel yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai skewness dan kurtosis mendekati nol.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2009).

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu:

1. Analisis Grafik

Salah satu cara dengan analisis ini adalah melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Cara lainnya adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2009).

2. Analisis Statistik

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov Smirnov. Apabila *asymptotic significance* dalam Uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 5 persen, maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2009).

Pada penelitian ini uji normalitas akan dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu uji statistik Kolmogorov Smirnov karena uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan, jika tidak hati-hati secara visual akan terlihat normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Dasar analisis Heteroskedastisitas menurut Ghozali (2009) adalah :

1. Jika ada pola tertentu pada grafik *Scatterplot*, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas pada grafik *Scatterplot*, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji statistik yang dilakukan adalah dengan menggunakan *Uji Park*. Uji Park dilakukan dengan meregresikan logaritma dari kuadrat residual ($\ln u_i^2$) sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen tetap. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, maka dalam data model regresi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada model tersebut tidak dapat ditolak (Ghozali, 2009).

3.5.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel sesama variabel bebas sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas.
3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai toleransi dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Sebuah model dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10, Ghozali (2006).

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis Regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2009). Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda sebab penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Sesuai dengan rumusan masalah, maka model regresinya adalah sebagai berikut :

$$CSR = B_0 + B_1FS_i + B_2DF_i + B_3DG_i + B_4SIZE_i + B_5IND_i + B_5ROA_{i-1} + e_i$$

Keterangan :

CSR : Indeks pengungkapan CSR

FS : Presentase kepemilikan asing

DF : Ketergantungan pada pihak asing, 1 = ada, 0 = tidak

DG : Ketergantungan proyek pemerintah, 1 = ada , 0 = tidak

SIZE : Ukuran perusahaan berdasar total aset

IND : 1=perusahaan industri, 0=perusahaan non industri

ROA : *Return on assets* tahun 2010

e_i : error

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T).

3.5.4.1 Uji Pengaruh Simultan (F Test)

Menurut Ghozali (2007), F test pada dasarnya menunjukkan bahwa semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang hendak di uji adalah sebagai berikut:

H_0 : suatu variabel bebas bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat.

H_a : suatu variabel bebas merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat.

Pengujian dilakukan dengan cara menggunakan signifikan level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Jika nilai signifikansi $<0,05$ maka H_a diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Semakin kecil nilai R^2 maka, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas dan semakin mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Karena dalam penelitian ini jumlah variabel independen adalah lebih dari dua, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 yang berkisar antara nol (0) sampai dengan satu (1) (Ghozali, 2001). Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati satu (1) maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Parsial (t Test)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Uji ini dilakukan dengan ketentuan:

1. Jika nilai signifikansi $t < 0.05$,maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $t > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.